

## Kop perusahaan

Nomor :  
Lampiran :  
Hal : Permohonan.....

Kepada Yth :  
**Gubernur Papua Barat Daya Cq.**  
**Kepala Dinas Penanaman Modal**  
**Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu**  
**Provinsi Papua Barat Daya**  
di -  
Sorong

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan permohonan untuk Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam kepada Bapak Gubernur Papua Barat Daya. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan persyaratan-persyaratan sebagai bahan evaluasi persetujuan Izin Usaha Pertambangan tersebut diatas.

Demikian permohonan ini saya sampaikan, atas perkenaannya diucapkan terima kasih.

.....,  
..... Pemohon,

ttd stempel  
didas materai 10.000

(nama jelas)

### TEMBUSAN:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
2. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Provinsi Papua Barat Daya;

### Catatan :

Dokumen Formulir dan Persyaratan dapat diupload melalui scan qrcode berikut :



LAMPIRAN PERMOHONAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI MINERAL  
BUKAN LOGAM

I. PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama :
2. Alamat/Domisili :
3. NomorTelepon :
4. Telepon :
5. Website :
6. E-Mail :
7. Status Permodalan :
  - a. Nasional \*) :
  - b. Asing \*) :
8. Nomor Pokok Wajib Pajak : \*\*)
9. Akta Pendirian Perusahaan : \*\*).....(bergerak di bidang pertambangan)  
(disahkan oleh pejabat berwenang)
10. Akta PerubahanTerakhir : \*\*)  
(disahkan oleh pejabat berwenang)
11. Tanda Daftar Perusahaan : \*\*)
12. SIUP (Nasional)/BKPM (Asing) : \*\*)
13. Kartu Tanda Penduduk : \*\*)
14. Surat Keterangan Domisili : \*\*)
15. Daftar Perusahaan :  
Pertambangan dan/atau Jasa Yang  
masih dalam satu grup  
Keterangan : \*) diisidengan ( ) \*\*) foto copy dokumen  
dilampirkan

16. Susunan Direksi, Pengurus, dan Pemegang Saham :

A. Persyaratan Permohonan Baru untuk Badan Usaha:

1. Pakta Integritas bermaterai 10000
2. Surat Permohonan bermaterai 10000 ditujukan kepada Kepala DPMPTSP Papua Barat Daya;
3. Nomor Induk Berusaha (NIB);
4. Akte Pendirian Badan Usaha dan Perubahannya (jika ada perubahan) serta Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM;
5. Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership);
6. Fotokopi KTP Direktur/Penanggungjawab;
7. Surat Keterangan Domisili Lokasi Usaha;
8. Rekomendasi Kegiatan Operasi Produksi dari Bupati/Walikota setempat;
9. Berita Acara Peninjauan Lapangan;
10. Daftar Riwayat Hidup dan Surat Pernyataan Tenaga Ahli Pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun (melampirkan sertifikat kompetensi di bidang Pertambangan);
11. SK Pencadangan Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Papua Barat Daya;
12. Bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi;
13. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) dari Sistem OSS/Rekomendasi Tata Ruang dari Kabupaten/Kota;
14. Surat Keterangan Fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangn di bidang Perpajakan;
15. Persetujuan Lingkungan beserta dokumen lingkungan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
16. Berita Acara Rapat Koperasi (persyaratan khusus untuk badan usaha koperasi);
17. Surat Pernyataan bermaterai yang menerangkan keaslian dokumen persyaratan yang dilampirkan;
18. Salinan IUP Eksplorasi;
19. SK Pengangkatan Kepala Teknik Tambang (KTT) dari Kepala Inspektur Tambang (KaIT);
20. SK Pengesahan Studi Kelayakan dari Dinas Teknis;
21. SK Pengesahan Laporan Akhir Eksplorasi;
22. SK Pengesahan dokumen rencana Reklamasi dan Rencana Pasca Tambang;
23. Laporan Rencana kerja dan Anggaran Biaya (RKAB); dan
24. Surat Kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan).

B. Persyaratan Permohonan Perpanjangan untuk Badan usaha:

1. Surat Permohonan bermaterai 10000 ditujukan kepada Kelapa DPMPTSP Papua Barat Daya;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB);
3. Akte Notaris (perubahan terakhir);
4. Daftar Pemegang Saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (Beneficial Ownership);
5. Rekomendasi perpanjangan dari Bupati/Walikota/Kepala DPMPTSP Kab/Kota sesuai kewenangannya;
6. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi;
7. SK Pengesahan Laporan Akhir Kegiatan Operasi Produksi mencakup Neraca Sumber Daya Cadangan;
8. Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Biaya;
9. Surat kuasa bermaterai cukup (apabila dikuasakan);
10. Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH) yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
11. Dokumen Rencana Reklamasi dan Pasca Tambang;
12. Bukti pelunasan pembayaran pajak;
13. Surat pernyataan bermaterai untuk mematuhi ketentuan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
14. Surat pernyataan bermaterai yang menerangkan keaslian dokumen persyaratan yang dilampirkan; dan
15. Laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik.

.....,  
..... Pemohon,

(nama jelas)